**LAW ENFORCEMENT EFFORTS AGAINST TRAFFIC ACCIDENT CRIMES LINKED TO
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING TRAFFIC
AND ROAD TRANSPORTATION**

**UPAYA PENEGAK HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU
LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Vira Ranisya Hadi

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang
Hk20.virahadi@mhs.ubpkarawang.ac.id

Deny Guntara

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Muhamad Abas

Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Abstract

To encourage economic development, technological progress, local government, state formation, administrative responsibility, and the safe and effective transportation of people and goods across the country, the federal government must fulfill its commitment to a highly developed transportation infrastructure. The purpose of this is to learn about incidents involving vehicles and seek efforts from law enforcement and the public to reduce the number of traffic accidents. Empirical Juridical Methodology is used in this research process and research specifications use analytical descriptive. The results of the research from the first problem formulation are, as a preventive measure, increasing supervision of road traffic and transportation such as facilities and infrastructure, infrastructure, and vehicle safety on the road and secondly, based on the law, criminal accidents are an incident caused by unintentional, negligent and careless driving by a perpetrator. The author concludes that in efforts to enforce traffic laws, there needs to be awareness and an important role for the government, as well as law enforcers, to participate in encouraging the public to be more aware when driving and pay attention to whether vehicles are suitable for use or not. For perpetrators of traffic accident offenses there are sanctions that apply through Article 310, but in general in traffic accident cases the Restorative Justice method is often used because the incident is an Ordinary Offense.

Keywords: *Transportation; Traffic; Road Transport; Security.*

Abstrak

Untuk mendorong pembangunan ekonomi, kemajuan teknologi, pemerintahan daerah, pembentukan negara bagian, tanggung jawab administratif, dan transportasi orang dan barang yang aman dan efektif di seluruh negeri, pemerintah federal harus memenuhi komitmennya terhadap infrastruktur transportasi yang sangat maju. Tujuan dari ini untuk mempelajari tentang insiden yang melibatkan kendaraan dan mencari upaya dari penegak hukum dan masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Metodologi Yuridis Empiris digunakan dalam proses penelitian ini dan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian dari rumusan masalah Pertama yaitu, Sebagai langkah pencegahan, dilakukannya peningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan seperti sarana dan prasarana, infrastruktur, dan keselamatan kendaraan di jalan dan yang Kedua, berlandaskan Undang-Undang, kecelakaan tindak pidana sebagai suatu kejadian yang dikarenakan ketidaksengajaan, kelalaian dan ketidak hati-hatian saat berkendara seorang pelaku. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Dalam Upaya penegak hukum pada lalu lintas

perlu nya kesadaran dan peran penting pemerintah, serta penegak hukum untuk ikut serta mendorong Masyarakat agar lebih sadar saat berkendara dan memperhatikan kendaraan apakah layak dipakai atau tidak. untuk pelaku delik kecelakaan lalu lintas ada sanksi yang berlaku melalui Pasal 310, namun pada umumnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas seringkali menggunakan metode Restorative Justice yang dikarenakan kejadian tersebut merupakan Delik Biasa.

Kata Kunci : Transportasi; Lalu Lintas; Angkutan Jalan; Keamanan.

I. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana utama yang memainkan fungsi penting dalam kehidupan manusia, termasuk yang sering kita lihat dan berlalu lalang di sepanjang jalan yakni motor, mobil dan juga angkutan umum. Dalam hal ini juga tidak terlepas dari terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mana manusia memiliki ego dan mengabaikan keamanan bagi pengemudi dan orang lain, sehingga mengakibatkan insiden kendaraan yang fatal. Lebih jauh, transportasi memiliki peran krusial dan strategis dalam mencapai beberapa tujuan, antara lain memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan hubungan internasional, dan mewujudkan wawasan nusantara. Menurut “Undang-Undang Dasar 1945”, fungsi ini penting maka dari itu menjadi landasan pemikiran berupa “Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas” dan “Undang-Undang No. 14 Tahun 1992” terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang dianggap tidak relevan masyarakat di Indonesia.

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, fungsi transportasi dan lalu lintas jalan dalam memajukan persatuan dan pembangunan nasional sangat penting untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk

memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, otonomi daerah, kenegaraan, dan keselamatan, jalanan serta transportasi jalan harus mampu memanfaatkan potensinya dan berkontribusi pada jaringan transportasi nasional. tanggung jawab untuk manajemen. Akibatnya, Undang-Undang 22 Tahun 2009, yang mengatur sistem transportasi nasional, Undang-Undang 14 Tahun 1992 tergantikan dan membawa perubahan substansial pada subjek tersebut.

Dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan rencana transportasi dan lalu lintas jalan, pembagian kewenangan pembinaan ada untuk memastikan bahwa setiap orang mengetahui uraian tugasnya. Seiring dengan terwujudnya mobilitas yang tenang, teratur, lancar, dan saling terhubung melalui jalan, UU No. 22 Tahun 2009 juga dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian negara, mencapai kesejahteraan masyarakat, membina persatuan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mampu menjaga kehormatan negara.

Namun, tak sedikit masyarakat yang masih lolos saat berkendara tanpa SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak tertib dan kurangnya edukasi saat berkendara serta ketidaklayakan

jalanan dan lingkungan yang mengakibatkan kecelakaan pada pengendara. Perlu adanya pemeriksa lebih lanjut oleh pihak yang berwenang sebagaimana yang telah di jabarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 208 Ayat 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 4 Ayat 10 yang berisikan tentang upaya penegak hukum dalam menertibkan masyarakat agar menjadi pengemudi yang beretika dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tidak jarang kelalaian pengemudi berujung pada kecelakaan fatal, dengan menimbulkan korban meninggal dunia atau terluka parah, dan korban lainnya kerap merenggut nyawa pengemudi. Pengemudi yang berperilaku baik, santun, dan tepat waktu turut membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang jalan raya. Langkah-langkah pengelolaan yang komprehensif untuk pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan pengendalian akan menjadi fokus upaya ke depan untuk meminimalkan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang terjadi setiap tahun, menurut undang-undang ini.

Pengaturan dan penjatuhan pidana diatur lebih lanjut dalam undang-undang ini. Untuk pelanggaran yang tidak terlalu serius, akan ada hukuman penjara atau denda, yang tidak terlalu berat. Namun dalam kasus pelanggaran berat bila ada komponen tujuannya bisa dikenakan hukuman pidana yang jauh lebih

berat. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin hal tersebut tidak membebani masyarakat secara berlebihan sekaligus menimbulkan efek jera bagi pihak yang melanggar hukum.

Dengan adanya pembatasan tersebut di atas dan kesiapan masyarakat untuk mematuhi saat berkendara, sangat mungkin kita bisa mengurangi frekuensi kecelakaan di jalan raya. Undang-undang menetapkan norma dan prinsip yang wajib dipatuhi oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan manusia. Akibat dari ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, akan muncul inkonsistensi hukum dan sistem akan rusak. Itulah sebabnya kecerobohan sering kali mengakibatkan kecelakaan, dan kecelakaan tersebut merugikan orang lain. Berikut “Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” mengatur tentang hukum pidana yang berkaitan dengan kasus kecelakaan: “jika korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00,(dua belas juta rupiah)”. Kecerobohan atau kelalaian bisa mengakibatkan kematian seseorang, agar para pelanggar mendapat hukuman yang berat dan agar semua pengemudi memahami bahwa konsekuensinya serius dan mereka tidak selalu

ceroboh.¹

Berlandaskan uraian di atas, muncul sebagian permasalahan yaitu:

1. Bagaimana upaya penegak hukum dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan pada lalu lintas?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas?

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan Yuridis Empiris. Metode penelitian ini Merupakan metodologi hukum yang memiliki tujuan untuk mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam suatu lingkungan masyarakat agar dapat melihat hukum dalam kehidupan nyata,² dengan data primernya yaitu wawancara dan observasi secara langsung dengan di dukung data sekunder, penelaahan dokumen dan regulasi nya.

Penelitian ini mengikuti pedoman analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menjabarkan uraian yang komprehensif dan rinci tentang hasil penelitian. Dengan memanfaatkan teori, peraturan presiden, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, hasil penelitian dinilai berlandaskan data primer dan sekunder tentang pelanggaran kecelakaan lalu lintas.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana Upaya Penegak Hukum Dalam Meminimalisir Terjadinya Kecelakaan Pada Lalu Lintas?

Kedepannya para pembina, legislator, dan aparat penegak hukum akan bekerja sama untuk menerapkan langkah-langkah komprehensif guna mengurangi frekuensi kecelakaan lalu lintas. Kombinasi dari manajemen sumber daya manusia, peningkatan edukasi lalu lintas, dan akses ke penasihat hukum akan membawa perubahan ini.

Sebagai langkah pencegahan, dilakukannya peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan serta jalan, infrastruktur, dan keselamatan kendaraan di jalan. Upaya regulasinya meliputi rekayasa dan pengaturan lalu lintas, serta pemutakhiran sistem dan infrastruktur transportasi. Penegak hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif melalui penetapan peraturan yang lebih jelas dan penerapan denda yang lebih berat.

Upaya untuk membangun budaya keselamatan dan keamanan dalam lalu lintas dan angkutan jalan diuraikan di bawah ini, sesuai Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dengan Pasal 208 ayat 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

¹ Undang-Undang republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (jakarta pusat :Dilandas Babinkam Polri), hlm.166

² Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (Riau : CV.DOTPLUS Publisher),hlm.04

1. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini
2. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
5. penegak hukum secara konsisten dan berkelanjutan³

Sebagai fenomena sosial, perluasan dan pematangannya memengaruhi setiap aspek peraturan dan persyaratan kehidupan sehari-hari.⁴ Instruktur lalu lintas yang bertanggung jawab merupakan komponen penting masyarakat yang harus mendukung inisiatif ini, jika kita ingin berhasil menciptakan budaya berkendara yang aman dan terjamin. Sebagaimana dinyatakan Pasal 208 ayat 1 : “Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pemerintah menggunakan segala cara yang dimilikinya untuk mencoba dan memberikan

pengaruh yang lebih besar pada masyarakat dalam upaya untuk melakukan perubahan,⁵ penegak dan penerapan hukum ialah suatu upayanya.⁶

Dalam mengupayakan keselamatan pada lalu lintas dan angkutan jalan kita perlu perhatikan pada Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2022 pasal 4 Ayat (10) tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut

1. Penyempurnaan regulasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terkait pengguna jalan yang berkeselamatan
2. Kampanye dan Sosialisasi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Integrasi surat izin mengemudi dengan pencatatan data dan pelanggaran
4. Pemeriksaan kondisi pengemudi, dan
5. Penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas.⁷

Namun, pada fakta dilapangan kondisi jalan masih banyak yang perlu diperhatikan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang tak terduga yang bisa menyebabkan luka luka hingga kematian, pada hal ini penegak hukum perlu memperhatikan lebih lanjut dengan kondisi jalan dan juga melakukan

³ Pasal 208 Ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁴ Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegak Hukum (Jawa Barat : PT. RajaGrafindo Persada),hlm.03

⁵ Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP (Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press),hlm.03

⁶ Penyelesaian Perkara Pidana (Jakarta : Sinar Grafika),hlm.01

⁷ Pasal 4 Ayat 10 Huruf A, C, D, J dan K Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

pemeriksaan kondisi pengemudi. Karena tak jarang masyarakat memaksakan berkendara dalam keadaan mengantuk, tidak sehat atau mabuk dalam perjalanan.

Demi menciptakan keselamatan lalu lintas masyarakat pun bertanggung jawab atas kendaraan masing masing. Karena kecelakaan terjadi tak hanya dari faktor lingkungan saja, berikut kecelakaan dapat terjadi karena beberapa hal diantara nya:

1. Kelalaian pengemudi dalam berkendara

Terjadinya kecelakaan di jalan raya karena terjadinya pelanggaran oleh pengemudi. Pengemudi mengabaikan terhadap aturan yang berlaku baik disengaja maupun tidak, hal itu bisa mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan oleh kelalaian seringkali diakibatkan oleh tindakan pengemudi, seperti hal nya mengendarai kendaraan dalam keadaan sakit, pengaruh alkohol dan mengantuk sehingga bisa menimbulkan kecelakaan

2. Ketidaklayakan kendaraan yang dipakai

Ada beberapa hal yang perlu pengemudi perhatikan terhadap kendaraan yang aktif dalam pemakaian seperti a. Rem blong, rem merupakan peran penting dalam komponen kendaraan guna untuk mengendalikan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. Ada baiknya sebelum bepergian melakukan pengecekan terhadap rem, b. Ban, kondisi ban sangat mempengaruhi saat berkendara. Tak jarang banyak terjadi kecelakaan lalu lintas yang dikarenakan

oleh ban meletus, kendaraan oleng dan ban gundul yang mengakibatkan kendaraan hilang kendali, c. Lampu kendaraan, penerang pada jalanan sangat mempengaruhi penglihatan para pengendara, bila mana tidak sengaja melewati jalanan atau lingkungan yang kurang dalam penerangan di malam hari maka lampu kendaraan lah yang bisa kita andalkan.

3. Ketidaklayakan jalan atau lingkungan

Jalanan merupakan faktor penting bagi keselamatan, terutama pada pengendara roda dua. Dengan kondisi jalan yang berlubang akan menyebabkan kecelakaan, selain itu jalanan yang minim penerangan dan adanya tikungan yang tajam yang tidak difasilitasi Convex Mirror (cermin cembung) sangat rentan terjadinya kecelakaan karena kurangnya jarak pandang dari berlawanan arah yang terhalang atau tidak terlihat.

Ketiga hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang pemudi dan juga pemerintah ikut serta dalam hal ini, karena pemerintah berperan penting dalam keselamatan, karena masih banyak jalanan di suatu tempat atau wilayah yang tidak pantas dan berbahaya untuk dilalui oleh pengemudi yang akan berakibatkan fatal.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan bahwa, penyebab dari banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yakni rendahnya kesadaran pengemudi untuk

berkontribusi terhadap banyaknya kecelakaan lalu lintas, dan mayoritas pengendara sepeda motor melanggar hukum dengan berkendara melawan arus, tidak memakai helm, mengemudi tanpa SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan banyaknya pengendara anak di bawah umur.

Penegak hukum telah berupaya meningkatkan kesadaran pengemudi, khususnya yang mengendarai sepeda motor. Mereka melakukan ini dengan memasang rambu lalu lintas dan menjangkau berbagai daerah, sekolah, dan bahkan perusahaan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mahasiswa dan karyawan yang berlalu lintas Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, ketertiban, dan etika pada pengemudi terutama yang mengoperasikan sepeda motor

3.2 Penyelesaian tindak pidana pelaku kecelakaan lalu lintas

Saat berkendara perlu dilakukan secara tertib menaati lalu lintas, Hal ini dilakukan untuk meningkatkan arus lalu lintas, keamanan, dan keselamatan. guna mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun pelanggaran rambu lalu lintas tidak mungkin diabaikan dan pelanggaran etika lalu lintas terus menjadi hal biasa di masyarakat. Hukum yang paling menantang adalah hukum pidana,⁸ sebab itu adanya penyelesaian tindak pidana pada pelaku yang melanggar tata tertib lalu

lintas sehingga memicu kecelakaan, berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada sebagian proses pemeriksaan yang harus ditempuh yakni acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan cepat serta acara pengecekan singkat.

Berikut adalah hukuman yang akan diberikan oleh pihak yang melanggar lalu lintas berlandaskan pasal 310 yakni ;

- 1) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud melalui Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”
- 2) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud melalui Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).”
- 3) “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat

⁸ Hukum Pidana Indonesia (Jakarta:Sinar Grafika),hlm.1

sebagaimana dimaksud melalui Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

- 4) “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.⁹

Namun, berlandaskan Undang-Undang, kecelakaan suatu peristiwa yang diakibatkan oleh suatu insiden merupakan suatu tindak pidana., kelalaian dan ketidak hati-hatian saat berkendara seorang pelaku. Dan hal tersebut merupakan Delik Biasa, jika menyangkut pelanggaran umum dalam sistem, peradilan pidana bisa menyelidiki, menuntut, dan memberikan keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran sistemik tanpa melibatkan korban. Kejahatan pengaduan yang melibatkan sistem peradilan pidana berbeda dari kasus ini, dimana pengaduan korban merupakan prasyarat untuk dilakukannya penyidikan. Hakim juga hendaknya menggunakan metode Restorative Justice sebagai landasan musyawarah internal dalam mengambil keputusan.

Adapun sanksi yang dapat diterima oleh pelaku berlandaskan Peraturan Presiden

Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 14 Ayat 2 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni :

1. Peringatan Tertulis
2. Penghentian sementara kegiatan / pelayanan umum
3. Denda administratif dan/atau
4. Pembatalan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas dan/atau perizinan berusaha.¹⁰

Pada sanksi yang ada di peraturan presiden tersebut berlaku juga untuk pengemudi angkutan jalan sehingga berdampak pada usaha yang mengakibatkan penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum. Untuk pelaku pengendara lalu lintas yang melanggar aturan tetap diberlakukan sanksi berupa peringatan yang mana jika melanggar peringatan tersebut akan disampaikan secara tertulis oleh penegak hukum yang berwenang dan denda administratif yang sudah ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

IV. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil dari pembahasan tersebut, penulis bisa menyimpulkan yakni : Dalam Upaya penegak hukum pada lalu lintas perlu nya kesadaran dan peran penting pemerintah, serta penegak hukum untuk ikut serta mendorong Masyarakat agar lebih sadar saat berkendara dan memperhatikan kendaraan

⁹ Pasal 310 Ayat 1,2,3 dan 4 UU No. 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Pasal 14 Ayat 2 Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

apakah layak dipakai atau tidak. Melakukan cek secara berkala untuk memastikan jalanan tidak ada yang berlubang dan segera diperbaiki jika ada, penerangan jalan dan rambu lalu lintas, penegak hukum perlu memberi sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan anak sekolah mengenai pentingnya tata tertib berkendara serta mengajak masyarakat dan anak-anak sekolah ikut andil dalam perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) agar memiliki skill berkendara yang baik dan salah satu mematuhi pemerintah. Dan untuk pelaku delik kecelakaan lalu lintas ada sanksi yang berlaku melalui Pasal 310, namun pada umumnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas seringkali menggunakan metode Restorative Justice yang dikarenakan kejadian tersebut merupakan Delik Biasa

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Andi Hamzah, Hukum Pidana Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, 2017
- Asep Supriadi, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Perspektip Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2020
- Edi Saputra Hasibuan, Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegak Hukum, Jawa Barat : PT. RajaGrafindo Persada, 2021
- R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Demi Pasal, Bogor: Politeia, 1994.
- Univeristas Muhammadiyah Surakarta, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU

KUHP, Jawa Tengah : Muhammadiyah University Press, 2022

Muhammad Syahrums, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum : Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, Riau : CV. DOTPLUS Publisher, 2022

2. Peraturan Perundangan

- Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3. Jurnal

- Abdul Kholiq. Upaya Penegak Hukum Pada Perbuatan Main Hakim Sendiri (Studi Kasus di Desa Sedari Kabupaten Karawang), Jurnal Justisi Hukum Vol. 6, Hal 103. (2021)
- Agio V. Sangki. Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Neliti Media Vol. 1, hal 36. (2012)
- Reja A. Simanjuntak. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Neliti Media Vol. 1, hal 1-3. (2017)

4. Website

- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertanggungjawaban-hukum-dalam-kecelakaan-lalu-lintas-di-jalan- raya-1t63e9f48ab55b9/?page=3> (di akses pada tanggal 24 Mei 2024)
- <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7879/angka-kematian-kecelakaan-transportasi-turun-sepanjang-2023?lang=1> (di akses pada tanggal 24 Mei 2024)